

DEMOKRATISASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BULUROKENG KECAMATAN BIRINGKANAYYA KOTA MAKASSAR

Zaenal Akhmad¹, Hasran² & Rahman³

¹Universitas Pejuang RI Makassar, Indonesia

Email : zaenalakhmad64@gmail.com

²Universitas Pejuang RI Makassar, Indonesia

Email : doktorhasan@gmail.com

³ Universitas Pejuang RI Makassar, Indonesia

Email: doktorrahman12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Dasar penelitian adalah survey. Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (library Study), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (Field Research). Studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : Wawancara, Observasi, Kuesioner, Studi Kepustakaan. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*Purposive Sampling*”. Dalam menentukan sampel digunakan teknik Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dibantu dengan tabel frekuensi, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan Hasil Penelitian, Demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bulurukong dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi : Demokratisasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dimana intensitas jawaban responden pada “sering” yaitu 21 (55,26%), Demokratisasi masyarakat dalam bentuk tenaga, jawaban responden “sering” yaitu 20 (52,63%), Demokratisasi dalam bentuk uang atau materi, dengan intensitas jawaban responden “jarang” yaitu 23 (60,52 %), dan Demokratisasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, jawaban responden “tidak pernah” yaitu 18 (47,36%).

Kata kunci: Demokratisasi; Pembangunan

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peranserta seluruh elemen warga bangsa dimaksud. Sinergitas yang tinggi antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Zaenal Akhmad¹, Hasran² & Rahman³

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan demokratisasi masyarakat. Pembangunan bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Arti penting pembangunan kelurahan adalah bahwa dengan menempatkan kelurahan sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kota akan dapat lebih diwujudkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Otonomi Daerah seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah di harapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di suatu Daerah.

Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama : Perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya, kedua : Pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Perencanaan program pembangunan didaerah Kelurahan diperlukan adanya suatu pemerintahan kelurahan yang tangguh dan profesional dalam memberikan pemahaman terhadap program yang ada dikelurahan yang baik kepada masyarakat agar pembangunan dikelurahan berjalan dengan efisien dan tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang dan secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan dinegara kita, maka pemerintahan kelurahan harus benar-benar siap dan mampu untuk mengelolah setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Dari hasil pengamatan dari di lapangan didapatkan beberapa persoalan pembangunan yang terjadi di Kelurahan Bulurokeng, diantaranya adalah:

1. Perlunya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran air/drainase.
2. Kurangnya pemeliharaan lampu jalan
3. Tidak Meratanya Bantuan UMKM bagi Masyarakat
4. Perlunya penataan pedagang kaki lima (PKL)
5. Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat.
6. Perlu dilakukan pelatihan kerja dan kursus untuk meningkatkan keahlian masyarakat usia kerja.
7. Penataan sampah lingkungan di tiap Rt/Rw.
8. Masih terdapat pasangan suami istri yang yang tidak memiliki buku nikah karena pernikahan dilakukan dibawah tangan (secara agama).
9. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan posyandu.
10. Masih banyaknya keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan kesehatan dan dana sosial.
11. Kurangnya sarana prasarana penunjang sekolah, perbaikan sanitasi serta drainase sekolah dan penambahan ruang kelas baru.
12. Perlunya perhatian pada beberapa ruas jalan yang terkena banjir pada musim hujan.

Berdasarkan Pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, hal ini juga disebabkan karena masih kurangnya upaya yang dilakukan oleh aparat kelurahan untuk menggerakkan masyarakat dalam peningkatan pembangunan di kelurahan birngkanayya. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.

KAJIAN TEORI

Pengertian Demokratisasi

Demokratisasi aktif dalam pembangunan di kalangan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang selalu diharapkan, walaupun istilah yang dipakai untuk mendefenisikannya berbeda-beda. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, dalam perkembangan demokrasi dewasa ini dapat kita peroleh gambaran sebagai berikut:

1. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat.

2. Yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara.
3. Kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.

Konsep Dasar Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah society, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau demokratisasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Ada beberapa pengertian masyarakat: 1) Menurut (Selo Sumarjan 1974) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan; 2) menurut (Koentjaraningrat 1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama; 3) menurut (Ralph Linton 1968) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan social; 4) Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Faktor-Faktor/Unsur-Unsur Masyarakat Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini: 1) Beranggotakan minimal dua orang; 2) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan; 3) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat; dan 4) Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Ciri atau kriteria masyarakat yang baik menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan/disebut sebagai masyarakat: 1) Ada sistem

tindakan utama; 2) Saling setia pada sistem tindakan utama; 3) Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota; dan 4) Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran/reproduksi manusia.

Pengertian Pembangunan

Hakekat dari suatu pembangunan adalah perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu demokratisasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain Ginanjar Kartasmita secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Defenisi diatas memberikan penjelsan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik daripada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya Menurut Wrihatnolo pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

A Surjadi dalam bukunya "Pembangunan Masyarakat" mengemukakan arti pembangunan adalah sebagai suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin. Terlepas dari adanya perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan oleh para ilmuwan, tetapi ide pokok dalam konsep pembangunan secara umum adalah:

1. Pembangunan adalah proses, proses berarti suatu kegiatan yang terjadi secara terus menerus dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Artinya jika ada suatu kegiatan yang kelihatannya sebagai suatu pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilakukan secara berencana.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas, yakni cara hidup yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.

5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Demokratisasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1. Pentingnya Demokratisasi Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan demokratisasi berarti usaha yang terorganisir dari berbagai pihak (perempuan atau laki-laki) dan kelompok dimiskinkan untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya dan struktur/organisasi (FADO, 2001). Dengan demikian, konsep demokratisasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur dengan melibatkan masyarakat untuk mengambil inisiatif, pengambilan keputusan, menetapkan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada padanya.

Beberapa alasan mengapa demokratisasi menjadi isu penting dalam pembangunan berbasis masyarakat. Para ahli dan praktisi berbeda pandangan tentang kontekstualitas dan tatanan praktis demokratisasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa kasus muncul terkait dengan slogan demokratisasi yang digunakan untuk memformulasikan suatu tindakan dan dukungan terhadap suatu kebijakan dan rencana pengembangan yang mungkin penolakan dan perdebatan dikalangan bawah (*grassroot*). Oleh karena itu, dilakukan upaya legitimasi dan pelibatan semua sebagian elemen masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan itu. Hal ini disebabkan pemahaman yang tidak tepat tentang demokratisasi dikalangan pengambil kebijakan. Perlunya orientasi bagi para pemimpin, tokoh masyarakat, staf pemerintahan, aktivis LSM dan lembaga terkait lainnya untuk menyepakati kembali makna demokratisasi dalam pembangunan.

2. Prinsip-Prinsip Demokratisasi

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata demokratisasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh, menyebabkan formalisasi demokratisasi menjadi sangat bervariasi satu dengan lainnya. Tidak ada satu formulasi yang baku tentang konsep demokratisasi. Kata ini, mengandung suatu yang bergerak dinamis dalam suatu proses belajar. Demokratisasi dibangun atas dasar beberapa prinsip diantaranya:

a. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan demokratisasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horizontal. Demokratisasi tumbuh melalui konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan

yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan.

b. Tumbuh dari bawah

Demokratisasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah “top down” atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Demokratisasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Demokratisasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat *bottom-up*, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program.

c. Kepercayaan dan keterbukaan

Kunci sukses demokratisasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar ‘saling percaya’ dan ‘keterbukaan’. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses demokratisasi berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Sebagai contoh kasus penanganan hama terpadu (PHT), tidak dapat menunggu instruksi atau program yang direncanakan oleh Departemen Pertanian, tetapi harus segera ditangani dengan mengeliminasi sejauh mungkin kerugian yang lebih parah dengan pengambilan inisiatif dari petani sendiri dengan cara yang dianggap sesuai. Demokratisasi mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat.

Untuk tumbuh dan berkembang, demokratisasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen demokratisasi. Kotler menyebutkan beberapa elemen/prasyarat demokratisasi yang selalu dijumpai dalam setiap pembangunan yaitu Tujuan (*cause*), lembaga pengubah (*change agent*), dan sasaran yang akan diubah (*change target*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Dasar penelitian adalah survey yaitu metode melalui pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dari sejumlah responden yang dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (*library Study*), sedangkan data primer adalah data yang bersumber dari studi lapang (*Field Research*). Studi lapang yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: Wawancara, Observasi, Kuesioner, Studi Kepustakaan.

Mengingat fokus dari penelitian ini adalah bagaimana demokratisasi masyarakat khususnya di Kelurahan Bulurokeng, maka yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*Purposive Sampling*” dengan harapan bahwa informan dan responden yang dipilih mewakili populasi. Dalam menentukan sampel digunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dibantu dengan tabel frekuensi, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Untuk beberapa data tertentu digunakan bantuan data kuantitatif dalam menganalisisnya. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Demokratisasi Dalam Bentuk Ide Atau Pikiran

Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan tidak saja saja terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga dalam menyumbang ide/pikiran serta proses pengambilan keputusan dan pemilihan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan semacam itu memungkinkan masyarakat secara luas berdemokratisasi dalam pelaksanaannya, juga dapat mendatangkan sisi positif yang lain. Demokratisasi masyarakat dalam bentuk ide dapat disajikan seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Demokratisasi Responden Dalam bentuk Ide atau Pikiran

n = 38

Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Sering	3	7,89
Sering	21	55,26
Jarang	11	28,94
Tidak Pernah	3	7,89
Jumlah	38	100

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2022

Berdasarkan pada tabel 1 diatas jumlah responden dalam demokratisasi bentuk ide yang menjawab Sering adalah 21 orang atau 55,26 %, jarang Sebesar 11 orang atau 28,94 %.

Pengembangan demokratisasi masyarakat dalam menyumbang ide/pikiran, dikaji dalam dua penyaluran aspirasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk formal dimana dilakukan dalam rapat-rapat kelurahan atau pertemuan formal lainnya tetapi terhubung tidak semua masyarakat ikut dalam rapat kelurahan maka Pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan diluar forum formal dengan aparat pemerintah kelurahan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh

masyarakat dalam pengambilan kebijakan ditingkat kelurahan guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat guna pengembangan dan pembangunan kelurahan yang berkesinambungan.

Berdasarkan Wawancara dengan Lurah Kelurahan Bulurokeng bapak Akhdar Darwin dikatakan bahwa:

“ dalam pelaksanaan pertemuan formal (rapat kelurahan) tidak semua elemen masyarakat diundang dalam mengikuti rapat kelurahan, yang diundang hanya Tokoh Masyarakat, Lurah, dan Perwakilan masyarakat (ketua RT)” (wawancara pukul 19.00, 12 agustus 2022).

Tetapi menurut Lurah Kelurahan Bulurokeng tidak ada larangan bagi masyarakat untuk ikut dalam rapat. Asumsi dari hanya beberapa elemen yang diundang didasarkan bahwa tokoh masyarakat, Lurah dusun, dan ketua RT adalah karena mereka sebagai pengejawantahan dari masyarakat kelurahan itu, disamping karena mereka memiliki kemampuan untuk menghimpun, menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Demokratisasi Dalam Bentuk Tenaga

Demokratisasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikutsertaannya mereka rela untuk tidak pergi kesawah atau kekebun. Bentuk demokratisasi semacam ini adalah merupakan bentuk demokratisasi yang paling tinggi. Kontribusi mereka lewat sumbangan tenaga dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai aspek dominan dalam keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat demokratisasi responden dalam bentuk tenaga sangat aktif dimana responden yang menjawab "sering" sebanyak 20 orang atau 52,63 % dan 3 orang responden yang menjawab jarang atau 7,89 %. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah.

Tabel 2
Demokratisasi Responden Dalam Bentuk Tenaga

n = 38

Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Sering	15	39,47
Sering	20	52,63
Jarang	3	7,89
Tidak Pernah	0	0
Jumlah	38	100

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2022

Dari tabel 2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokratisasi masyarakat dalam bentuk tenaga terbilang Baik, dimana keinginan untuk saling bekerja sama dan tolong menolong (gotong royong) masih sangat erat. Responden yang menjawab "sering dan sangat sering" sebagian besar beralasan karena itu merupakan kewajiban bersama dan merupakan bentuk demokratisasi yang mudah tanpa mengeluarkan uang, adapun responden yang menjawab merasa malu jika tidak ikut ambil

Zaenal Akhmad¹, Hasran² & Rahman³

bagian dalam menyumbangkan tenaganya. Dari beberapa alasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Kelurahan Bulurokeng dalam mengikuti demokratisasi dalam bentuk tenaga masih tinggi. Adapun responden yang menjawab "jarang" disebabkan karena punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak tahu.

Berikut kutipan salah satu wawancara dengan warga masyarakat Kelurahan Bulurokeng bapak janwar tentang demokratisasi dalam bentuk tenaga:

"demokratisasi dalam bentuk tenaga merupakan hal yang bisa saya berikan untuk pembangunan Kelurahan Bulurokeng karena jika diminta memberikan yang lain sangat susah bagi kami (uang)" (wawancara pukul 17.20, 12 Agustus 2022).

Demokratisasi Dalam Bentuk Uang Atau Materi

Dari sisi demokratisasi yang lain, adalah demokratisasi masyarakat dalam pembangunan dengan bentuk uang ataupun material (bahan bangunan). Selama ini dana-dana pembangunan yang ada adalah secara swadaya dan APBD. Sedangkan untuk demokratisasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabenehnya adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial. Seperti perangkat kelurahan ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat kelurahan setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan.

Tabel 3
Demokratisasi Responden Dalam Bentuk Uang atau Materi

n = 38

Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Sering	0	0
Sering	6	15,78
Jarang	23	60,52
Tidak Pernah	9	23,68
Jumlah	38	100

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2022

Dari tabel 3 diatas tentang demokratisasi responden dalam bentuk uang atau materi dapat dilihat bahwa responden yang menjawab "jarang" dan "tidak pernah" menempati peringkat terbanyak dimana responden yang menjawab "jarang" sebanyak 23 orang atau 60,52 % dan "tidak pernah" sebanyak 9 orang atau 23,68 %. Tingkat demokratisasi dalam bentuk uang atau materi sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat dimana responden yang menjawab "jarang" dan "tidak pernah" beralasan karena memiliki keuangan yang tidak memungkinkan untuk disumbangkan dan memiliki kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi. Sedangkan responden yang menjawab "sering" umumnya lebih condong kearah menyumbangkan materi.

Demokratisasi Dalam Bentuk Mengevaluasi Hasil Pembangunan

Bentuk demokratisasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan merupakan sesuatu yang urgen, dimana disini dapat dilihat bagaimana hasil dari pembangunan itu sendiri, sesuai atau tidak dengan apa

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil dari evaluasi ini diharapkan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan selanjutnya.

Berikut disajikan Demokratisasi responden dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan seperti pada tabel 5 dibawah ini. Hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa responden pada umumnya menjawab "jarang" dan "Tidak pernah" dimana, 13 orang yang menjawab jarang atau 34,21 % dan 18 orang yang menjawab "tidak pernah" atau 47,36 %.

Tabel 5
Demokratisasi Responden Dalam Bentuk Mengevaluasi Hasil Pembangunan

n = 38

Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Sering	1	2,63
Sering	6	15,78
Jarang	13	34,21
Tidak Pernah	18	47,36
Jumlah	38	100

Sumber Data: Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2022

Kurangnya animo masyarakat kelurahan dalam mengevaluasi hasil pembangunan bukan merupakan indikator pada pencapaian demokratisasi pembangunan tetapi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat kepada pemerintah kelurahan yang kurang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.8 "pertemuan responden dengan pemerintahan kelurahan dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi". Tabel 5 dapat dilihat, dimana intensitas pertemuan dengan masyarakat antara Lurah kelurahan, staf kelurahan, dan tokoh masyarakat "jarang", intensitas pertemuan dengan Lurah dusun dan tokoh masyarakat yang "sering" terlaksana.

Kriteria yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian bermanfaat atau tidaknya hasil pembangunan yang telah dilaksanakan ialah seberapa dekat hasil pembangunan itu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien atau tidak.

KESIMPULAN

Demokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Bulurukong dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi:

1. Demokratisasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dimana intensitas jawaban responden pada "sering" yaitu 21 (55,26%).
2. Demokratisasi masyarakat dalam bentuk tenaga, jawaban responden "sering" yaitu 20 (52,63%).
3. Demokratisasi dalam bentuk uang atau materi, dengan intensitas jawaban responden "jarang" yaitu 23 (60,52 %).
4. Demokratisasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, jawaban responden "tidak pernah" yaitu 18 (47,36%).

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono. 2002. *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arief Sirajuddin, Ilham. 2007. *Pembangunan Berkarakter Perspektif Mengubah yang Semu Menjadi Nyata*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Brata, I Nyoman. 1982. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Coralie Bryant, Lousie G White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Daldjoeni N, Suyitno A. 1985. *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Direktur Jenderal Pembangunan Desa. 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Sosial Di Pedesaan*, Cetakan I. Jakarta: Rajawali.
- Kartasasmika, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S.
- , 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka.
- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Liberty.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Ndraha, Talidzuhu, Kybernology. 2003. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Prasadja, Buddy. 1980. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.
- Safi'I,H.M. 2007. *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang: Averroes Press.
- Sjahrir dan Korten1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat (Beberapa Tinjauan Pustaka)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumaryadi Nyoman.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sudjijono Budi & Rudianto Doddy. 2003. *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*. Jogyakarta: Citra Mandala Pratama.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grfindo Persada.
- , 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.